

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

KEBIJAKAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (STUDI KASUS: HUTAN NAGARI SALIBUTAN, PROVINSI SUMATERA BARAT)

NURWANSYAH



PROGRAM STUDI PASCASARJANA ILMU PENGELOLAAN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024





PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Kebijakan Daerah Sumatera Barat Dalam Percepatan Perhutanan Sosial (Studi Kasus: Hutan Nagari Salibutan, Provinsi Sumatera Barat)” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Oktober 2024

Nurwansyah
NIM E1501222011



RINGKASAN

NURWANSYAH. Kebijakan Daerah Sumatera Barat Dalam Percepatan Perhutanan Sosial (Studi Kasus: Hutan Nagari Salibutan, Provinsi Sumatera Barat). Dibimbing oleh IIN ICHWANDI dan HENDRAYANTO (pengganti alm. Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S)

Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki 82% atau 950 nagari/desa sekitar hutan. Banyaknya nagari di sekitar hutan akan menyebabkan ketergantungan akan sumber daya hutan. Pemerintah Sumatera Barat menjadikan kehutanan sebagai fokus pembangunan. Program perhutanan sosial merupakan harapan baru bagi pemerintah dalam peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Pemprov Sumbar membuat kebijakan daerah berupa Pergub Sumbar No 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial sebagai bentuk keseriusan dalam percepatan perhutanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis Pergub Sumbar No. 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial dan perkembangan perhutanan sosial Sumatera Barat, (2) Menganalisis implementasi Pergub Sumbar No. 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial di Hutan Nagari Salibutan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*in depth interview*) dan kajian literatur. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis konten dan analisis implementasi kebijakan Grindle (1980).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pergub Sumbar No 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial dapat menjadi pendorong percepatan perhutanan sosial karena mengatur terkait fasilitasi kepada masyarakat, kelembagaan sebagai wadah kolaborasi, monitoring evaluasi, dan pembiayaan untuk pengelolaan perhutanan sosial. Pergub ini mengatur tentang percepatan perhutanan sosial, penyelesaian konflik tenurial, dan sinkronisasi peran para pihak dalam perhutanan sosial. Implementasi Pergub Sumbar No 52 Tahun 2018 dapat dilaksanakan cukup baik di lapangan dilihat dari keterlaksanaannya. Namun, masih terdapat beberapa isi Pergub yang belum terlaksana secara optimal seperti adanya keterlibatan aktif dari OPD lain dalam perhutanan sosial. Pergub ini membawa dampak dan perubahan yang positif di Hutan Nagari Salibutan dilihat dari kriteria evaluasi menurut Permen LHK No 9 Tahun 2021 meliputi aspek administrasi, ekologi, sosial, dan ekonomi. Adanya Pergub ini dapat membantu masyarakat yang ingin mengajukan permohonan izin perhutanan sosial berupa bantuan fasilitasi hingga pendanaan.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, Peraturan Gubernur (Pergub), perhutanan sosial

SUMMARY

NURWANSYAH. West Sumatra Regional Policy in Accelerating Social Forestry (Case Study: Hutan Nagari Salibutan, West Sumatra Province). Supervised by IIN ICHWANDI and HENDRAYANTO (replacement alm. Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S)

West Sumatra is an area that has 82% or 950 nagari/villages around the forest. The number of nagari around the forest will cause dependence on forest resources. The West Sumatra government has made forestry a focus of development. The social forestry program is a new hope for the government in improving the economy of communities around the forest. The West Sumatra Provincial Government made a regional policy in the form of West Sumatra Governor Regulation No. 52/2018 on the Implementation of Social Forestry Facilitation as a form of seriousness in accelerating social forestry. This research aims to: (1) analyze the Governor Regulation of West Sumatra No. 52/2018 on the Implementation of Social Forestry Facilitation and the development of social forestry in West Sumatra, (2) analyze the implementation of the Governor Regulation of West Sumatra No. 52/2018 on the Implementation of Social Forestry Facilitation in Salibutan Nagari Forest. Data collection was conducted with in-depth interviews and literature review. Data analysis was conducted using descriptive qualitative approach, content analysis and Grindle (1980) policy implementation analysis.

The results showed that West Sumatra Governor Regulation No. 52/2018 on the Implementation of Social Forestry Facilitation can be a driver of social forestry acceleration because it regulates facilitation to the community, institutions as a forum for collaboration, monitoring and evaluation, and financing for social forestry management. This gubernatorial regulation regulates the acceleration of social forestry, tenurial conflict resolution, and synchronization of the roles of parties in social forestry. The implementation of the West Sumatra Governor Regulation No 52/2018 can be implemented quite well in the field as seen from its implementation. However, there are still some contents of the Governor Regulation that have not been optimally implemented, such as the active involvement of other OPDs in social forestry. This gubernatorial regulation has brought positive impacts and changes in the Salibutan Nagari Forest seen from the evaluation criteria according to Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 9 of 2021 including administrative, ecological, social, and economic aspects. The existence of this governor regulation can help people who want to apply for a social forestry license in the form of facilitation assistance to funding.

Keywords: Governor Regulation (Pergub), implementation, policy, social forestry



@Hak cipta milik IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2024
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

KEBIJAKAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (STUDI KASUS: HUTAN NAGARI SALIBUTAN, PROVINSI SUMATERA BARAT)

NURWANSYAH

Tesis
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister pada
Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan

**PROGRAM STUDI PASCASARJANA ILMU PENGELOLAAN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024**



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Judul Tesis : Kebijakan Daerah Sumatera Barat Dalam Percepatan Perhutanan Sosial (Studi Kasus: Hutan Nagari Salibutan, Provinsi Sumatera Barat)

Nama : Nurwansyah
NIM : E1501222011

Disetujui oleh

Pembimbing 1:
Dr. Ir. Iin Ichwandi, M.Sc.F.Trop.

Pembimbing 2:
Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr.Sc.
(pengganti alm. Prof. Dr. Ir. Hariadi
Kartodihardjo, M.S)

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr.Sc.
NIP 19611126198601001

Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan :
Prof. Dr. Ir. Naresworo Nugroho, M.S.
NIP 196501221989031002

Tanggal Ujian:
27 Agustus 2024

Tanggal Lulus:
08 OCT 2024



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanaahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan September 2023 sampai bulan Oktober 2023 ini ialah kebijakan kehutanan daerah, dengan judul “Kebijakan Daerah Sumatera Barat Dalam Percepatan Perhutanan Sosial (Studi Kasus: Hutan Nagari Salibutan, Provinsi Sumatera Barat)”.

Terima kasih penulis ucapkan kepada para pembimbing, alm. Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S dan Dr. Ir. Iin Ichwandi, M.Sc.F.Trop yang telah membimbing dan banyak memberi saran. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada moderator seminar, dan penguji luar komisi pembimbing. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Tito Trio Putra, S.Hut, M.Si selaku Sub Koordinator Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Jahidir, S.H selaku Wali Nagari Salibutan, dan Bapak Amir Husin selaku Ketua LPHN Salibutan yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah (Syawaladi), ibu (Nurmaini), serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, doa, dan kasih sayangnya. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman Ilmu Pengelolaan Hutan yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa selama berkuliah di Institut Pertanian Bogor.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Bogor, Oktober 2024

Nurwansyah



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
1.5 Kerangka Pemikiran	5
II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Perhutanan Sosial	7
2.2 Kebijakan Publik	8
2.3 Implementasi Kebijakan	9
III METODE	13
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	13
3.2 Alat dan Bahan	14
3.3 Jenis dan Metode Pengumpulan Data	14
3.4 Analisis data	15
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	18
4.1 Kebijakan Perhutanan Sosial	18
4.1.1 Kebijakan Pusat Perhutanan Sosial	18
4.1.2 Kebijakan Daerah Perhutanan Sosial Sumatera Barat (Pergub Sumbar No. 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial)	20
4.2 Perkembangan Perhutanan Sosial Sumatera Barat	26
4.3 Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Daerah Sumbar	31
4.3.1 Pelaksanaan Kebijakan	31
4.3.2 Dampak Implementasi	49
4.3.3 Tantangan dan prospek perhutanan sosial ke depan	63
V SIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Simpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	71
RIWAYAT HIDUP	79



DAFTAR TABEL

1	Matriks metode penelitian	17
2	Telaah ruang lingkup Pergub Sumbar No. 52 Tahun 2018	21
3	Capaian perhutanan sosial per skema tahun 2011-2023 di Sumatera Barat	27
4	Capaian perhutanan sosial per skema Sumatera Barat (Desember 2023)	27
5	Pendapatan dan persen kenaikan petani hutan dalam Perhutanan Sosial	30
6	Elemen implementasi Grindle pada ruang lingkup Pergub	32
7	Pasal Pergub dalam elemen implementasi Grindle	32
8	Alokasi dana per serapan tahun anggaran 2022	47
9	Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja 2022 bidang perhutanan sosial	48
10	Struktur APBD tahun 2022 berdasarkan sumber dana	48
11	Output implementasi Pergub Sumbar No 52 Tahun 2018 berdasarkan ruang lingkup	59
12	Dampak implementasi Pergub Sumbar No. 52 Tahun 2018 di Hutan Nagari Salibutan (berdasarkan kriteria pada Permen LHK No 9 Tahun 2021)	59

DAFTAR GAMBAR

1	Kerangka pemikiran penelitian	6
2	Model implementasi kebijakan Grindle (1980)	11
3	Peta lokasi penelitian di Hutan Nagari Salibutan	14
4	Teknik <i>Content Analysis</i> (Bungin 2015)	15
5	Lini masa kebijakan perhutanan sosial Indonesia dan posisi Pergub Sumbar No 52 Tahun 2018	19
6	Peraturan Perhutanan Sosial Pasca UUCK	22
7	Struktur Pokja PPS Sumbar	24
8	Struktur LPHN Salibutan	50
9	Struktur KUPS Bidang HHBK LPHN Salibutan	51
10	Kotak lebah madu yang dikelola oleh KUPS Lebah Madu Galo-Galo LPHN Salibutan	52
11	Struktur KUPS Bidang Ekowisata LPHN Salibutan	52
12	Ekowisata Nyarai yang dikelola oleh KUPS Nyarai LPHN Salibutan	53
13	Struktur KUPS Bidang Agroforestry LPHN Salibutan	54
14	Sekretariat KUPS Asam Kandis Bundo Gamaran tempat dilakukannya berbagai kegiatan pengolahan asam kandis	55
15	Proses penjemuran asam kandis di dalam green house	55
16	Wawancara bersama Wali Korong Gamaran	56
17	Wawancara bersama Ketua LPHN Salibutan	56
18	Wawancara dengan pihak Dishut Sumbar	57
19	Wawancara bersama Wali Nagari Salibutan dan pihak LPHN Salibutan	58
20	Serapan masyarakat sebagai pemandu wisata dari tahun 2013-2019	62



DAFTAR LAMPIRAN

1	Lampiran 1 Tabel analisis isi teks kebijakan dengan implementasi pendekatan teori Grindle (1980)	72
2	Lampiran 2 Pagu indikatif tahun 2021-2026 program pembangunan daerah Sumatera Barat bidang perhutanan sosial	78